



Pemkot Beralih ke Open Source

Jadi Pilot Project Nasional, Atasi Perangkat Lunak Bajakan

YOGYAKARTA (SI) – Seluruh perangkat lunak komputer yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang selama ini memakai Microsoft akan diimigrasi (dialihkan) ke Program Perangkat Lunak Open Source (PLOS).

Program PLOS ini adalah fasilitas aplikasi perkantoran perangkat lunak legal nonprabayar. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Rapingun mengutarakan, diimigrasikannya perangkat lunak komputer ke PLOS ini bertujuan mengurangi ketergantungan mengakses perangkat lunak bajakan.

"Kebijakan ini bagian dari program pemerintah pusat yang menjadikan DIY dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai pilot project pelaksanaan PLOS," katanya.

Sebagai tahap awal, yang akan diimigrasi adalah perangkat lunak komputer yang ada di Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT) dan Bagian Organisasi.

Targetnya, seluruh perangkat sudah bisa diakses per Juni 2009, mendatang. "Kami akan mengandeng kerja sama dengan Yayasan Air Putih dan komunitas *opensource* dalam pelaksanaan pengembangan *help desk* nasional PLOS ini," terangnya.

Kepala Bagian (Kabag) Teknologi Informasi dan Telematika (TIT) Pemkot Yogyakarta Rudi Firdaus mengatakan, penggunaan perangkat *opensource* memiliki banyak keunggulan. Dari sisi keuangan, *opensource* jauh lebih murah karena tidak berbayar. Selain itu, dengan menggunakan perangkat PLOS ini, pemerintah tidak perlu menganggarkan dana untuk penyediaan anti virus. Karena, jaringan *opensource* sudah dilengkapi perangkat antivirus.

"Untuk sistem PLOS, satu komputer, biaya yang diperlukan hanya berkisar Rp750.000 per *operating system*. Jika diprogram seluruhnya, anggaran yang dibutuhkan Rp2 juta. Berbeda dengan sistem sebelumnya, di mana untuk memprogram satu komputer anggaran yang disiapkan mencapai Rp5 juta," ujarnya.

Sebagai daerah rintisan untuk suksesi program ini, kata dia, Pemkot sangat diuntungkan. Karena, seluruh anggaran disediakan oleh pemerintah pusat. Dia menargetkan, dari 750 perangkat komputer yang tersedia di Pemkot Yogyakarta, maka dalam beberapa tahun ke depan sudah dilengkapi dengan perangkat PLOS. "Sebagai *locus pilot project* Pemkot tentu sangat diuntungkan. Hanya, berapa anggaran yang harus disiapkan Pemkot, saya tidak tahu persis," urainya.

Diakui Rudi, keberadaan perangkat bajakan masih banyak digunakan jaringan komputer yang ada di Pemkot. Namun demikian, dia mengklaim, pengadaan perangkat bajakan di luar faktor kesediaan pemerintah. Dalam setiap pengadaan barang yang dilakukan pemerintah, perangkat yang dipesan selalu legal.

Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Yogyakarta Ardianto mengaku mendukung langkah Pemkot. Mengingat program *opensource* ini sudah mengakomodir berbagai sistem operasi yang disediakan Linux. Hanya, dia berharap agar sebelum dilakukan migrasi, Pemkot menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu di bidangnya. "Sejak awal Pemkot harus sudah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pegawai agar siap mengoperasikan sistem yang baru," katanya.

(arif budianto)

Untuk diketahui

Ditujukan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Ditembus Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Bag. Tek. Inform & Telematika	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. Bag. Organisasi	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Teknologi Informasi dan			

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005